



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.323, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.  
Pembangunan UPT Pemasarakatan. Rencana  
Induk.

## PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa kondisi lembaga pemsarakatan dan rumah tahanan negara sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan saat ini sebagian besar mengalami overkapasitas, sehingga selain berdampak menurunnya pengawasan, pelayanan, dan kendali, juga dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa pada Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan yang sudah mengalami overkapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi, ataupun pembangunan baru lembaga pemsarakatan dan rumah tahanan negara yang dituangkan dalam suatu rencana induk yang bersifat menyeluruh, terpusat, dan terkoordinasi, untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan asas tata pemerintahan yang baik, berhasil guna, transparan, dan akuntabel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01. Tahun 2011 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 252);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

**Pasal 1**

Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Rencana Induk dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang komprehensif berdasarkan analisa kebutuhan dan skala prioritas sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 2**

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

BAB II     STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

BAB III    PENUTUP.

**Pasal 3**

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan operasional Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicantumkan dalam peta jalan (*road map*) pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan 2012-2015.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Umum

Lembaga pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka lembaga pemasyarakatan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana agar dapat melaksanakan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara maksimal.

Pada saat ini kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara sebagian besar mengalami over kapasitas. Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah jauh melebihi kapasitas yang seharusnya. Kondisi overkapasitas akan menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan para narapidana, seperti kasus perkelahian antarnarapidana serta kasus tindak pidana lainnya. Overkapasitas juga mengakibatkan menurunnya pelayanan dan perawatan, rentan gangguan keamanan dan ketertiban, melemahnya rentang kendali dan pengawasan.

Kondisi overkapasitas ini sudah berlangsung lama dan hampir terjadi di **seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia** terutama yang berada di kota besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, misalnya dengan pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara baru pada wilayah pemekaran untuk menambah kapasitas hunian. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara lama dengan penambahan ruang hunian, optimalisasi pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat. Dengan langkah seperti itu diharapkan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang cukup besar bisa diatasi.

Pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara baik dalam bentuk rehabilitasi maupun rekonstruksi merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas hunian dalam rangka mengatasi over kapasitas, meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan secara lebih baik.

Pemenuhan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak dipenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dapat diatasi.

Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyusun pola pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara untuk menangani masalah overkapasitas dengan menyusun Peraturan Menteri tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Induk ini sebagai acuan untuk:

- a. merencanakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang komprehensif berdasarkan analisa kebutuhan dan skala prioritas sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. merencanakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sehingga dapat menyelesaikan masalah overkapasitas.

## C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk adalah rencana yang disusun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membangun Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.

3. Unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Rumah Tahanan Negara adalah selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**BAB II**  
**STRATEGI PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN UPT PEMASYARAKATAN**

**A. Penyusunan Rencana Pembangunan UPT Pemasarakatan**

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Lapas atau Rutan perlu dibuat skala prioritas pembangunan Lapas dan Rutan pada wilayah yang mengalami overkapasitas atau wilayah yang dimungkinkan sebagai penyangga over kapasitas. Pembangunan UPT Pemasarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok prioritas:

1. Prioritas I yaitu wilayah yang memiliki overkapasitas di atas 75%

No.	Wilayah	Kapasitas	Isi	Over Kapasitas	Persentase (%)
1	Sumatera Utara	6674	15194	8520	128
2	Kepulauan Riau	1072	1996	924	86
3	Riau	1555	4697	3142	202
4	Jambi	978	2103	1125	115
5	Bengkulu	730	1298	568	78
6	DKI Jakarta	5056	10921	5865	116
7	Jawa Barat	7808	15206	7398	95
8	Kalimantan Timur	1642	3814	2172	132

2. Prioritas II yaitu wilayah yang memiliki overkapasitas 50% sampai dengan 75%

No.	Wilayah	Kapasitas	Isi	Over Kapasitas	Persentase (%)
1	Sumatera Selatan	4028	6187	2159	54
2	Nangroe Aceh Darussalam	1973	3433	1460	74
3	Kalimantan selatan	2404	3716	1312	55
4	Kalimantan Barat	1500	2523	1023	68

3. Prioritas III yaitu wilayah yang memiliki overkapasitas kurang 50%

i

No.	Wilayah	Kapasitas	Isi	Over Kapasitas	Persentase (%)
1	Lampung	2887	4312	1425	49
2	Sumatera Barat	1951	2448	497	25
3	D.I. Yogyakarta	913	1241	328	36
4	Jawa Timur	10682	15513	4831	45
5	Sulawesi Tengah	1180	1576	396	34
6	Sulawesi Tenggara	1035	1498	463	42
7	Bangka Belitung	860	969	109	12
8	Jawa Tengah	11736	9805	-	-
9	Kalimantan Tengah	1912	1711	-	-
10	Sulawesi Utara	1630	1539	-	-
11	Gorontalo	410	566	156	19
12	Sulawesi Selatan	4661	3717	-	-
13	Bali	1432	1712	280	17
14	Nusa Tenggara Timur	2820	2828	8	6
15	Maluku	1360	772	-	-
16	Maluku Utara	1023	554	-	-
17	Papua Barat	436	401	-	-
18	Papua	1558	1199	-	-
19	Nusa Tenggara Barat	1196	1616	420	35
20	Banten	3163	4542	1379	44
21	Sulawesi Barat	334	400	66	20

Berdasarkan data kapasitas tersebut, wilayah yang menjadi prioritas utama pembangunan Lapas atau Rutan dalam rangka menambah kapasitas hunian tidak hanya mempertimbangkan persentase overkapasitas melainkan juga harus mempertimbangkan jumlah kelebihan penghuni Lapas atau Rutan masing-masing wilayah.

Adapun wilayah yang menjadi prioritas utama adalah pertimbangan kelebihan penghuni di atas 1500 (seribu lima ratus) orang, sehingga mendesak untuk dibangun Lapas atau Rutan sebagai penyangga overkapasitas, yaitu:

No.	Wilayah	Kapasitas	Isi	Over Kapasitas	Persentase (%)
1	Sumatera Utara	6674	15194	8520	128
2	Riau	1555	4697	3142	202
3	DKI Jakarta	5056	10921	5865	116
4	Jawa Barat	7808	15206	7398	95
5	Kalimantan Timur	1642	3814	2172	132
6	Sumatera Selatan	4028	6187	2159	54
7	Jawa Timur	10682	15513	4831	45

## B. Pelaksanaan Rencana Pembangunan UPT Pemasarakatan

Pelaksanaan rencana pembangunan UPT Pemasarakatan harus berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang berkesinambungan.

Upaya yang dilakukan dalam penambahan kapasitas harus sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperlukan strategi dalam menentukan rencana pembangunan yang meliputi:

### 1. Pembangunan Baru

Pembangunan baru dilakukan pada wilayah yang mengalami overkapasitas lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dengan ambang kelebihan kapasitas melebihi 1500 (seribu lima ratus) orang.

### 2. Pembangunan Kembali

Pembangunan kembali atau rekonstruksi dilakukan sebagai upaya penataan kembali UPT Pemasarakatan yang mengalami overkapasitas 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen). Pembangunan kembali dilakukan apabila pada lokasi tersebut masih dimungkinkan dari segi tata ruang dan luas lahan yang tersedia, namun apabila tidak dimungkinkan maka dilakukan relokasi ke tempat lain yang masih berada pada wilayah yang sama sehingga dalam operasionalnya masih menggunakan satuan organisasi lama.

### 3. Pembangunan Baru pada Daerah Pemekaran Wilayah

Pembangunan UPT Pemasarakatan baru yang dilaksanakan pada daerah pemekaran wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi penegakkan hukum di wilayah tersebut.

### 4. Rehabilitasi atau Renovasi

Rehabilitasi atau renovasi dilakukan pada UPT Pemasarakatan yang masih dimungkinkan untuk ditambah kapasitasnya dengan tingkat overkapasitas sampai dengan 50% (lima puluh persen).

## C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan terhadap implementasi pembangunan UPT Pemasarakatan dilakukan secara berkala dengan fokus terhadap tindak lanjut temuan mencakup capaian kerja dan kendala. Selain pemantauan,

hal lain yang harus dilakukan adalah evaluasi terhadap hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hasil evaluasi akan digunakan untuk perumusan kebijakan, perencanaan dan implementasi pembangunan UPT Pemasarakatan selanjutnya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan UPT Pemasarakatan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Peta Jalan (Road Map) Pembangunan UPT Pemasarakatan 2012-2015

Peta jalan pembangunan UPT Pemasarakatan sebagai berikut:

**MBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASARAKATAN TAHUN 2012**

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
<b>1</b>	<b>NANGROE ACEH DARUSSASALAM</b> LPKN Langsa (Sarana Operasional) LP wanita Sigli (sarana operasional)	<b>NANGROE ACEH DARUSSASALAM</b> LP Bener Meriah (Target Minimal Operasional 2013) LP Blangpidie (Target Minimal Operasional 2015)	<b>NANGROE ACEH DARUSSASALAM</b> LP Banda Aceh (Lanjutan) Cabang Rutan Lokh Nga (Lanjutan) Cabang Rutan Singkil (Lanjutan)
<b>2</b>	<b>Sumatera Utara</b> LPKN Pematang Siantar (sarana operasional minimal)	<b>Sumatera Utara</b> LP Langkat (Target Minimal Operasional 2014) LPKN Langkat (Target Minimal Operasional 2014) Rutan Humbang Hasundutan (Target Minimal Operasional 2014)	<b>Sumatera Utara</b> Rutan Medan (Rekonstruksi)
<b>3</b>	<b>Riau</b> Lapas Pekanbaru/kulim (Lanjutan) [minimal operasional]	<b>Riau</b> LP Terbuka Rumbai (Target Minimal Operasional 2013)	<b>Riau</b>
<b>4</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>Sumatera Barat</b> LPKN Sawah Lunto (Target Minimal Operasional 2013) Rutan Sawahlunto (Target Minimal Operasional 2014)	<b>Sumatera Barat</b> Rutan Talu (Lanjutan) Lapas Wanita Bukit Tinggi (Lanjutan)

	LP Dharma Raya (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Kelas II A Payakumbuh (Usulan Relokasi) Rutan Kelas II B Pinaran (Usulan Relokasi) Rutan Padang
5	Jambi LP Muara Sabak ( Tanjung Jabung Timur ) [saran operasional]	Jambi Jambi
6	Bengkulu LP Sarolangun (Target Minimal Operasional 2013)	Bengkulu Lapas Bengkulu baru (Usulan Relokasi) Lapas Mokomuko (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Lebong (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Kepahiang (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Kaur (Usulan Pembangunan Baru)
7	Sumatera Selatan LP Kayu Agung (minimal operasional; Sarana operasional) LP Baryu Asin (minimal operasional; Sarana Operasional)	Sumatera Selatan Sumatera Selatan Lapas Palembang (Merah Mata) Lapas Waykanan (Lanjutan) Rutan Pagar Alam (Relokasi Lanjutan)
8	Lampung LP Anak Bandar Lampung (minimal Operasional; sarana operasional)	Lampung Lampung Lapas Kotabumi (Usulan Pembangunan Baru)

<b>9</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>Kepulauan Riau</b>
	LPKN Tanjung Pinang (sarana operasional)	LP Natuna (Target Minimal Operasional 2015)	Rutan Batam (Lanjutan)
<b>10</b>	<b>Bangka Belitung</b>	<b>Bangka Belitung</b>	<b>Bangka Belitung</b>
	LPKN Pangkal Pinang (sarana operasional)		
<b>11</b>	<b>Banten</b>	<b>Banten</b>	<b>Banten</b>
		Rutan Cilegon (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Tangerang (Lanjutan)
<b>12</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>DKI Jakarta</b>
			Rutan Salemba (Lanjutan)
			Lapas Cipinang (Lanjutan)
<b>13</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Barat</b>
	LP Banjar (sarana minimal operasional)	LP Anak Bandung (Target Minimal Operasional 2013)	Lapas Narkotika Bandung (Lanjutan)
		Rutan Garut (Target Minimal Operasional 2013)	Rutan Bandung (Lanjutan)
		LP Gunung Sindur (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Klas II A Bandung (Lanjutan)
		Rutan Gunung Sindur (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Cibinong (Lanjutan)
		LP Cikarang Bekasi (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Bogor (Lanjutan)
		Rutan Depok (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Warita Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)

			Lapas Pasir Jambu (Usulan Pembangunan Baru)			
			LPKN Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)			
14	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah			
			Lapas Pasir Putih Musakambangan (Lanjutan)			
			Lapas Narkotika Musakambangan (Lanjutan)			
			Lapas Batu NK (Lanjutan)			
			Lapas Kelas II A Pekalongan (REKONSTRUKSI)			
			Lapas Purwokerto (Relokasi Lanjutan)			
			Rutan Wonosobo (Usulan Relokasi)			
15	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur			
			LPKN Medium (Target Minimal Operasional 2014)			
			LPKN Pemekasaan (Target Minimal Operasional 2014)			
16	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta			
			Lapas Wirogunan (Lanjutan)			
17	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat			
			Rutan Bengkayang (Lanjutan)			
			Lapas Wanita Pontianak (Usulan Pembangunan Baru)			
18	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah			
			LPKN Kessongan (sarana operasional) Rutan/Lapas Temiang Layang (sarana Operasional)			
			LP Subamara (Target Minimal Operasional 2014)			



<b>Rutan/Lapas Tunjang Layang (sarana Operasional)</b>		
19	Kalimantan Selatan LP Banjar Baru (Sarana minimal operasional)	Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan
20	Kalimantan Timur Rutan Borohang (sarana operasional)	Kalimantan Timur Kalimantan Timur Rutan Penajem Pasir Utara (Target Minimal Operasional 2015) Lapas / Rutan Sandawar (Usulan Pembangunan Baru)
21	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan Rutan Sekyur (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Makale (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Sengbang (Lanjutan) Lapas Anak Pare-Pare (Lanjutan)
22	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara Rutan Raaha (Relokasi Lanjutan)
23	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah Rutan Poso (Lanjutan) Cabang Rutan Kolonedale (Lanjutan) Cabang Rutan Leok (Pembangunan Lanjutan)
24	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat LP anak Mamuju (Target Minimal Operasional 2014)

		LP Wanita Mampu (Target Minimal Operasional 2014)	
25	Sulawesi Utara	Rutan Pasang Kayu Mampu Utara Sulawesi Utara	Sulawesi Utara Cabang Rutan Amurang (Lanjutan)
26	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
	LP Pabuwato (sarana minimal operasional dan prasana lingkungan)		
27	Bali	Bali	Bali
		LPKN Bangli (Target Minimal Operasional 2015)	
28	NTB	NTB	NTB
	LP Anak Mataram (sarana operasional) LP Terbuka Mataram (pembangunan koridor dan blok hunian)		
29	NTT	NTT	NTT Lapas Anak Kupang (Lanjutan)
30	Maluku	Maluku	Maluku Lapas Piru (Lanjutan) Cabang Rutan Saparua (Lanjutan)
31	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara Rutan Weda (sarana operasional) Rutan Ternate (Lanjutan)

<b>32</b>	<b>Prasidat</b>	<b>Prasidat</b>	<b>Prasidat</b>
	<b>Rudjanto (sementral)</b>	<b>Rudjanto (Bogor)</b>	<b>Rudjanto (Bogor)</b>
<b>33</b>	<b>Rona</b>	<b>Rona</b>	<b>Rona</b>
		<b>Rona (Sajati)</b>	<b>Rona (Sajati)</b>

**PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TERKINI PEMASTABAKATAN TAHUN 2013**

No	Prioritas I <b>NAD</b>	Prioritas II <b>NAD</b>	Prioritas III <b>NAD</b>
<b>1</b>	LP Bener Meriah	LP Blangpidie (Target Minimal Operasional 2015)	LP Banda Aceh (Lanjutan) Cabang Rutan Loh Nga (Lanjutan) Cabang Rutan Singkil (Lanjutan) LP Wanita Sigi LPKN Langsa Lanjutan
<b>2</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Sumatera Utara</b> LP Langkat (Target Minimal Operasional 2014) LPKN Langkat (Target Minimal Operasional 2014)	<b>Sumatera Utara</b> Rutan Medan (Rekonstruksi) LPKN Pematang Siantar (Lanjutan.Prioritas I)
<b>3</b>	<b>Riau</b> LP Terbuka Rumbai	Rutan Humbang Hasundutan (Target Minimal Operasional 2014) <b>Riau</b>	<b>Riau</b> Lapas Pekanbaru ( kulim ) (Lanjutan)
<b>4</b>	<b>Sumatera Barat</b> LPKN Sawahlunto	<b>Sumatera Barat</b> Rutan Sawahlunto (Target Minimal Operasional 2014) LP Dharmasraya (Target Minimal Operasional 2014)	<b>Sumatera Barat</b> Rutan Talu (Lanjutan) Lapas Wanita Bukit Tinggi (Lanjutan) Rutan Padang Rutan Kelas II B Paiman (Usulan Relokasi)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LP Payahkumbuh (Usulan Relokasi) LP Lubuk Basung (Lanjutan)
<b>5</b>	<b>Jambi</b> LP Sarolangun	<b>Jambi</b>	<b>Jambi</b> LP Muara Sabak ( Tanjung Jabung Timur) (Lanjutan)
<b>6</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Bengkulu</b> Lapas Bengkulu Baru (Relokasi Lanjutan) Lapas Mekomuko (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Leborg (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Kepahiang (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Kaur (Usulan Pembangunan Baru)
<b>7</b>	<b>Sumatera Selatan</b> LP Kayu Agung LP Banyu Asin	<b>Sumatera Selatan</b> LPKN Palembang (Target Minimal Operasional 2014)	<b>Sumatera Selatan</b> Lapas Palembang (Merah Mata) Lapas Waykanan (Lanjutan) Rutan Pagar Alam (Relokasi Lanjutan)
<b>8</b>	<b>Lampung</b>	<b>Lampung</b>	<b>Lampung</b> Lapas kotabumi (Usulan Pembangunan Baru) LP Anak Bandar Lampung LP Gunung Sugih
<b>9</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>Kepulauan Riau</b> LP Natuna (Target Minimal Operasional 2015)	<b>Kepulauan Riau</b> rutan batam (Lanjutan) LPKN Tanjung Pinang (lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	Bangka Belitung
			LPKN Pangkal pinang
11	Banten	Banten	Banten
		Rutan Cilegon (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Tangerang (Lanjutan)
12	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
			Rutan Salemba (Lanjutan)
			Lapas Cipinang (Lanjutan)
13	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
	LP Anak Bandung	LP Gunung Sindur (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Narkotika Bandung (Lanjutan)
	Rutan Garut	LP Cikarang Bekasi (Target Minimal Operasional 2014)	Rutan Bandung (Lanjutan)
		Rutan Depok (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Klas II A Bandung (Lanjutan)
		Rutan gunung sindur (Target Minimal Operasional 2014)	Lapas Cibinong (Lanjutan)
			Lapas Bogor (Lanjutan)
			Lapas Wanita Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
			Lapas Pasir Jambu (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Tangerang (Lanjutan)
			LP Sukabumi Warungkara Lanjutan Prioritas I 2012
			LP Banjar Lanjutan Prioritas I 2012

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LPKN Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
<b>14</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Tengah</b> Lapas Pasir Putih Nusakambangan (Lanjutan) Lapas Narkotika Nusakambangan (Lanjutan) Lapas Batu NK (Lanjutan) Lapas Klas II A Pekalongan (Rekonstruksi) Lapas Purwokerto (Relokasi Lanjutan) Rutan Wonosobo (Usulan Rekonstruksi)
<b>15</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Jawa Timur</b> LPKN Madiun (Target Minimal Operasional 2014) LPKN Pamekasan (Target Minimal Operasional 2014) Rutan Klas I Surabaya (Rekonstruksi)
<b>16</b>	<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>D.I. Yogyakarta</b> Lapas Wirogunan (Lanjutan)
<b>17</b>	<b>Kalimantan Barat</b>	<b>Kalimantan Barat</b>	<b>Kalimantan Barat</b> Rutan Bengkayang (Lanjutan) Lapas Wanita Pontianak (Usulan Pembangunan Baru)
<b>18</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>Kalimantan Tengah</b> LP Sukamara (Target Minimal Operasional 2014) Rutan Tamiang Layang
<b>19</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>Kalimantan Selatan</b> LPKN Karang intan (Lanjutan Prioritas I 2012)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
20	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>Kalimantan Timur</b> Rutan Penjajem Pasir Utara (Target Minimal Operasional 2015)	LP Banjar Baru (Lanjutan Prioritas I 2012) <b>Kalimantan Timur</b> Rutan Bontang Lanjutan prioritas I 2012 LPKN Samarinda Kalimantan Timur (Lanjutan Prioritas I 2012) Lapas / Rutan Sendawar (Usulan Pembangunan Baru)
21	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>Sulawesi Selatan</b> Rutan Selayar (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Makale (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Sengkang (Lanjutan) Lapas Anak Pare-Pare (Lanjutan)
22	<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>Sulawesi Tenggara</b> Rutan Raha (Relokasi Lanjutan)
23	<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>Sulawesi Tengah</b> Rutan Poso (Lanjutan) Cabang Rutan Kolomedale (Lanjutan) Cabang Rutan Leok (Lanjutan)
24	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>Sulawesi Barat</b> LP anak Mamuju (Target Minimal Operasional 2014) LP Wanita Mamuju (Target Minimal Operasional 2014)	<b>Sulawesi Barat</b> Rutan Pasang Kayu Mamuju Utara
25	<b>Sulawesi Utara</b>	<b>Sulawesi Utara</b>	<b>Sulawesi Utara</b> Cabang Rutan Amurang (Lanjutan)



No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
26	<b>Gorontalo</b>	<b>Gorontalo</b>	<b>Gorontalo</b>
		LP Pahuwato	
27	<b>Bali</b>	<b>Bali</b>	<b>Bali</b>
		LPKN Bangli (Target Minimal Operasional 2015)	
28	<b>NTB</b>	<b>NTB</b>	<b>NTB</b>
	LP terbuka Mataram	LP Anak Mataram	
29	<b>NTT</b>	<b>NTT</b>	<b>NTT</b>
		Lapas Anak Kupang (Lanjutan)	
		LP Wanita Kupang	
		LP Lembata	
30	<b>Maluku</b>	<b>Maluku</b>	<b>Maluku</b>
		Lapas Piru (Lanjutan)	
		Cabang Rutan Saparua (Lanjutan)	
31	<b>Maluku Utara</b>	<b>Maluku Utara</b>	<b>Maluku Utara</b>
		Rutan ternate (Lanjutan)	
		Rutan Weda	
32	<b>Papua Barat</b>	<b>Papua Barat</b>	<b>Papua Barat</b>
		Rutan Raja Ampat (Target Minimal Operasional 2015)	
		Rutan Bintuni	
33	<b>Papua</b>	<b>Papua</b>	<b>Papua</b>
		Lapas Abepura (Lanjutan)	
		Lapas Merauke (Lanjutan)	

**PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TERORIS PEMASTABAKATAN TAHUN 2014**

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
<b>1</b>	<b>NAD</b>	<b>NAD</b>	<b>NAD</b>
		<b>IP Blangpidie (Target Minimal Operasional 2015)</b>	<b>IP Banda Aceh (Lanjutan) Cabang Rutan Lohk Nge (Lanjutan) Cabang Rutan Singkil (Lanjutan)</b>
			<b>Rutan Bener Meriah (Lanjutan.Prioritas I) LPKN Langsa (Lanjutan.Prioritas I) IP Wanita Sigli (Lanjutan.Prioritas I)</b>
<b>2</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Sumatera Utara</b>
	<b>Rutan Humbang Hasundutan</b>		<b>Rutan Medan (Rekonstruksi)</b>
	<b>IP Langkat</b>		<b>LPKN Pematang Siantar (Lanjutan.Prioritas I)</b>
	<b>LPKN Langkat</b>		
<b>3</b>	<b>Riau</b>	<b>Riau</b>	<b>Riau</b>
			<b>Lapas Pekanbaru ( kulum ) (Lanjutan)</b>
			<b>LP Terbuka Rumbai (Lanjutan.Prioritas I)</b>
<b>4</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>Sumatera Barat</b>
	<b>Rutan Sawahlunto</b>		<b>LPKN Sawah Lunto (Lanjutan.Prioritas I)</b>
	<b>IP Dharmasraya</b>		<b>IP Lubuk Besung (Lanjutan.Prioritas I)</b>
	<b>Lapas Wanita Bukit Tinggi</b>		<b>Rutan Padang (Lanjutan.Prioritas I) Lapas Klas II A Payakumbuh(Lanjutan.Prioritas I) Rutan Klas II B Paiman (Lanjutan.Prioritas I) Rutan Talu (Lanjutan)</b>

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
5	Jambi	Jambi	Jambi
			IP Muara Sabak / Tanjung Jabung Timur (Lanjutan Prioritas I)
			IP Sarolangun (Lanjutan Prioritas I)
6	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
			Lapas Bengkulu Baru (Relokasi Lanjutan)
			Lapas Mokoluko (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Labong (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kepahiang (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Kaur (Usulan Pembangunan Baru)
7	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
	LPKN Palembang		Lapas Palembang (Merah Mata) (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Pagar Alam (Relokasi Lanjutan)
			IP Kayu Agung (Lanjutan)
			IP Banyu Asin (Lanjutan)
8	Lampung	Lampung	Lampung
			Lapas Waykanan (Lanjutan)
			IP Anak Bandar Lampung (Lanjutan Prioritas I)
			IP Gunung Sugih (Lanjutan Prioritas I)
			Lapas Kotabumi (Usulan Pembangunan Baru)
9	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
		IP Natuna (Target Minimal Operasional 2015)	LPKN Tanjung Pinang (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
		<b>Rutan Batam (Lanjutan)</b>	
10	Bangka Belitung	Bangka Belitung	Bangka Belitung LPKN Pangkal Pinang (Lanjutan Prioritas I)
11	Banten	Banten	Banten
	Rutan Cilegon	Rutan Tangerang (Lanjutan)	
12	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta Rutan Salemba (Lanjutan) Lapas Cipinang (Lanjutan)
13	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
	LP Cilarang Bekasi		Lapas Markotika Bandung (Lanjutan)
	Rutan Depok		Rutan Bandung (Lanjutan)
	LP Gumung Sindur		Lapas Cibinong (Lanjutan)
	Rutan guruh sindur		Lapas Bogor (Lanjutan)
			LP Sukabumi (Lanjutan Prioritas I)
			LP Banjar (Lanjutan Prioritas I)
			LP Anak Bandung (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Garut (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Gumung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
			Lapas Wanita Gumung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
			Lapas Pesir Jambu (Usulan Pembangunan Baru)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
14	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah
			Lapas Batu NK (Lanjutan)
			Lapas Klas II A Pekalongan (Rekonstruksi)
			Lapas Purwokerto (Relokasi Lanjutan)
			Rutan Wonorebo (Usulan Rekonstruksi)
			Lapas Pasir Putih, Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Markotika, Nusakambangan (Lanjutan)
15	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur
	LPKN Mediam		Rutan Klas I Surabaya (REKONSTRUKSI)
	LPKN Panekasan		
16	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
			Lapas Wirogunan (Lanjutan)
17	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
			Rutan Bengkayang (Lanjutan)
			Lapas Wanita Pontianak (Usulan Pembangunan Baru)
18	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
	LP Sukemara		LPKN Kesongon (Lanjutan Prioritas I)
			LP Tamisang Layang (Lanjutan Prioritas I)
19	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
			LPKN Karang Idan (Lanjutan Prioritas I)
			LP Banjar Baru (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
20	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur Rutan Penajem Pasir Utara (Target Minimal Operasional 2015)	Kalimantan Timur LPKN Samarinda (Lanjutan Prioritas I) Rutan Bontang (Lanjutan Prioritas I) Lapas/Rutan Sandawar (Usulan Pembangunan Baru)
21	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan Rutan Sengkang (Lanjutan) Lapas Anak Pare-Pare (Lanjutan) Rutan Selayar (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Makale (Usulan Pembangunan Baru)
22	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara Rutan Raha (Rekayasa Lanjutan)
23	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah Cabang Rutan Kolonedale (Lanjutan) Rutan Poso (Lanjutan) Cabang Rutan Leok (Lanjutan)
24	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat Rutan Pasang Kayu Mamuju Utara (Lanjutan Prioritas I)
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara Cabang Rutan Amurang (Lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
26	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo IP Pahuwato (Lanjutan Prioritas I)
27	Bali	Bali	Bali LPKN Bangli (Target Minimal Operasional 2015)
28	NTB	NTB	NTB IP Anak Maharam (Lanjutan Prioritas I) IP terbuka Maharam (Lanjutan Prioritas I)
29	NTT	NTT	NTT Lapas Anak Kupang (Lanjutan) Rutan Kupang (Lanjutan) IP Wanita Kupang (Lanjutan Prioritas I) IP Lembata (Lanjutan Prioritas I)
30	Maluku	Maluku	Maluku Cabang Rutan Saperua (Lanjutan) Lapas Piru (Lanjutan)
31	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara Rutan Weda (Lanjutan Prioritas I) Rutan temale (Lanjutan)
32	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat Rutan Raja Ampat (Target Minimal Operasional 2015) Rutan Birtuni (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
<b>33</b>	<b>Papua</b>	<b>Papua</b>	<b>Papua</b>
			<b>Lapas Abepura (Lanjutan)</b> <b>Lapas Mirauke (Lanjutan)</b>

**PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TESIS PEMASYARAKATAN TAHUN 2016**

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
<b>1</b>	<b>NAD</b>	<b>NAD</b>	<b>NAD</b>
	LP Blangpidie		LP Banda Aceh (Lanjutan) Cabang Rutan Lokh Nga (Lanjutan) Cabang Rutan Singkil (Lanjutan)
			LPKN Langsa (Lanjutan Prioritas I) LP Wanita Sigli (Lanjutan Prioritas I) Rutan Bener Meriah (Lanjutan Prioritas I)
<b>2</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Sumatera Utara</b>
			LPKN Pematang Siantar (Lanjutan Prioritas I) LP Langkat (Lanjutan Prioritas I) LPKN Langkat (Lanjutan Prioritas I) Rutan Humbang Hasundutan (Lanjutan Prioritas I) Rutan Medan (Rekonstruksi)
<b>3</b>	<b>Riau</b>	<b>Riau</b>	<b>Riau</b>
			Lapas Pekanbaru ( kulim ) (Lanjutan) LP Terbuka Rumbai (Lanjutan Prioritas I)



No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
4	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat Rutan Talu (Lanjutan) Lapas Wanita Bukit Tinggi (Lanjutan) LP Lubuk Basung(Lanjutan Prioritas I) Rutan Padang (Lanjutan Prioritas I) LPKN Sawahlunto (Lanjutan Prioritas I) LP Dharmasraya (Lanjutan Prioritas I) Rutan Sawahlunto (Lanjutan Prioritas I) LP Payahkumbuh (Usulan Relokasi) Rutan Klas II B Painan (Usulan Relokasi)
5	Jambi	Jambi	Jambi LP Muara Sabak ( Tanjung Jabung Timur ) (Lanjutan Prioritas I) LP Sarolangun (Lanjutan Prioritas I)
6	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu Lapas Bengkulu Baru (Relokasi Lanjutan) Lapas Mokomuko (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Lebong (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Kepahiang (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Kaur (Usulan Pembangunan Baru)
7	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan Lapas Palembang (Merah Mata) (Lanjutan) LP Kayu Agung (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LP Banyu Asin (Lanjutan Prioritas I) LPKN Palembang (Lanjutan Prioritas I) Rutan Pagar Alam (Relokasi Lanjutan)
<b>8</b>	<b>Lampung</b>	<b>Lampung</b>	<b>Lampung</b> Lapas Waykanan (Lanjutan) LP Gunung Sugih (Lanjutan Prioritas I) Lapas Kotabumi (Usulan Pembangunan Baru) LP Anak Bandar Lampung ( Lanjutan prioritas I )
<b>9</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>Kepulauan Riau</b> Rutan Batam (Lanjutan) LP Natuna
<b>10</b>	<b>Bangka Belitung</b>	<b>Bangka Belitung</b>	<b>Bangka Belitung</b> LPKN Pangkal Pinang (Lanjutan Prioritas I) LPKN Tanjung Pinang (Lanjutan Prioritas I)
<b>11</b>	<b>Banten</b>	<b>Banten</b>	<b>Banten</b> Rutan Tangerang (Lanjutan) Rutan Cilegon (Lanjutan Prioritas I )
<b>12</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>DKI Jakarta</b> Rutan Salemba (Lanjutan) Lapas Cipinang (Lanjutan)
<b>13</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Barat</b> Lapas Narkotika Bandung (Lanjutan) Rutan Bandung (Lanjutan)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			Lapas Klas II A Bandung (Lanjutan)
			Lapas Cibinong (Lanjutan)
			Lapas Bogor (Lanjutan)
			LP Sukabumi Warungkiara (Lanjutan Prioritas I)
			LP Banjar (Lanjutan Prioritas I)
			LP Anak Bandung (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Garut (Lanjutan Prioritas I)
			LP Gunung Sindur (Lanjutan Prioritas I)
			LPKN Gunung Sindur (Lanjutan Prioritas I)
			LP Cikarang Bekasi (Lanjutan Prioritas I)
			Rutan Cilegon (Lanjutan Prioritas I)
			Lapas Wanita Gunung Sindur (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Gunung Sindur (Lanjutan)
			Lapas Pasir Jambu (Usulan Pembangunan Baru)
			Rutan Depok (Lanjutan Prioritas I)
<b>14</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Jawa Tengah</b>
			Lapas Pasir Putih Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Narkotika Nusakambangan (Lanjutan)
			Lapas Batu NK (Lanjutan)
			Lapas Klas II A Pekalongan (Rekonstruksi)
			Lapas Purwokerto (Relokasi Lanjutan)
			Rutan Wonosobo (Usulan Rekonstruksi)
<b>15</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Jawa Timur</b>
			LPKN Madiun (Lanjutan Prioritas I)

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
			LPKN Pamekasan (Lanjutan Prioritas I) Rutan Klas I Surabaya (Rekonstruksi)
16	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta Lapas Wirogunan (Lanjutan)
17	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat Rutan Bengkayang (Lanjutan) Lapas Wanita Pontianak (Usulan Pembangunan Baru)
18	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah <b>LPKN Kasongan (Lanjutan Prioritas I)</b> Rutan Tamiang Layang (Lanjutan Prioritas I) LP Sukamara (Lanjutan Prioritas I)
19	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan LPKN Karangintan (Lanjutan Prioritas I) LP Banjar Baru (Lanjutan Prioritas I)
20	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur LPKN Samarinda Kalimantan Timur (Lanjutan Prioritas I) Rutan Bontang (Lanjutan prioritas I) Lapas / Rutan Sendawar (Usulan Pembangunan Baru)

No	Prioritas I Sulawesi Selatan	Prioritas II Sulawesi Selatan	Prioritas III Sulawesi Selatan
21			Rutan Sengkang (Lanjutan) Lapas Anak Pare-Pare (Lanjutan) Rutan Selayar (Usulan Pembangunan Baru) Rutan Makale (Usulan Pembangunan Baru)
22	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara Rutan Raha (Relokasi Lanjutan)
23	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah Cabang Rutan Kolonedale (Lanjutan) Rutan Poso (Lanjutan) Cabang Rutan Leok (Lanjutan)
24	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat Rutan Pasang Kayu Mamuju Utara (Lanjutan Prioritas I) LP Anak Mamuju (Lanjutan Prioritas I) LP wanita Mamuju (Lanjutan Prioritas I)
25	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara Cabang Rutan Amurang (Lanjutan)
26	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo LP Pahuwato (Lanjutan Prioritas I)
27	Bali LPKN Bangli	Bali	Bali

No	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
<b>28</b>	<b>NTB</b>	<b>NTB</b>	<b>NTB</b> LP Anak Mataram (Lanjutan Prioritas I) Rutan Kupang (Lanjutan Prioritas I) LP terbuka Mataram (Lanjutan Prioritas I)
<b>29</b>	<b>NTT</b>	<b>NTT</b>	<b>NTT</b> Lapas Anak Kupang (Lanjutan) LP Wanita Kupang (Lanjutan Prioritas I) LP Lembata (Lanjutan Prioritas I)
<b>30</b>	<b>Maluku</b>	<b>Maluku</b>	<b>Maluku</b> Lapas Piru (Lanjutan) Cabang Rutan Saparua (Lanjutan)
<b>31</b>	<b>Maluku Utara</b>	<b>Maluku Utara</b>	<b>Maluku Utara</b> Rutan Ternate (Lanjutan) Rutan Weda (Lanjutan Prioritas I)
<b>32</b>	<b>Papua Barat</b> Rutan Raja Ampat	<b>Papua Barat</b>	<b>Papua Barat</b>
<b>33</b>	<b>Papua</b>	<b>Papua</b>	<b>Papua</b> Lapas Abepura (Lanjutan) Lapas Merauke (Lanjutan) Rutan Bintuni (Lanjutan Prioritas I)

### BAB III PENUTUP

Strategi penanganan overkapasitas penghuni Lapas atau Rutan dilakukan melalui pembangunan baru, pembangunan kembali (rekonstruksi) atau relokasi, pembangunan baru pada daerah pemekaran wilayah, dan rehabilitasi atau renovasi yang dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Rencana Induk ini diharapkan menjadi acuan dalam rangka penanganan overkapasitas demi terselenggaranya pemenuhan hak terutama layak hunian dalam rangka perawatan bagi tahanan dan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana serta keterpaduan kelangsungan pembangunan Lapas atau Rutan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR